

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) pada 14 Februari 2024. Dengan 200 juta pemilih, Pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia (Krismantari & Ramadhani, 2023). Di sisi lain, Pemilu 2024 merupakan kesempatan untuk menguatkan kembali demokrasi yang terus melemah. Sejumlah lembaga seperti Freedom House dan Democracy Index menunjukkan penurunan kualitas demokrasi dengan indeks demokrasi Indonesia masuk dalam kategori bebas sebagian dan demokrasi cacat. Selain itu, ada tantangan terkait perilaku elite politik yang dapat menggerus cita-cita demokrasi (Wahyu, 2024).

Jumlah pemilih, yang mencakup 74% dari total populasi Indonesia, akan menyalurkan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Krismantari & Ramadhani, 2023). Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, ada tiga kandidat yang bersaing, yakni Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Ketiga kubu berupaya merayu publik melalui konten yang didistribusikan melalui beragam media baik media massa maupun media sosial selama periode kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024. Selain konten kampanye, konten-konten lain yang beredar di media sosial, yakni hoaks. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan ada 203 isu hoaks pemilu dengan total sebaran di platform digital sebanyak 2.882 konten sejak November 2024 atau ketika masa kampanye dimulai hingga 2 Januari 2024 (Bestari, 2024).

Hoaks adalah informasi palsu yang tersebar luas dan berpotensi mempengaruhi publik, baik melalui berita, foto, video, atau pesan di media sosial dan lainnya. Tujuan hoaks bisa bermacam-macam, termasuk mengganggu ketahanan nasional, pemerintah, atau etika masyarakat (Juditha, 2018). Hoaks dapat merusak integritas demokrasi, memecah belah negara, dan merugikan proses pembangunan. Selain itu, hoaks bisa memanipulasi opini publik dan merusak

reputasi individu atau partai politik, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik. Penanganannya memerlukan penegakan hukum, aturan, dan literasi publik, serta upaya antisipasi melalui gerakan literasi media baru dan kerjasama dengan aparat hukum (Amilin, 2019). Disinformasi adalah informasi yang salah atau palsu, tetapi orang yang menyebarkan atau membuat informasi mengetahui kesalahan tersebut dan tetap menyebarkannya sebagai kebenaran Unesco (2019). Oleh karena itu, hoaks dan disinformasi dapat dibedakan karena hoaks sendiri merupakan salah satu jenis disinformasi yang dibuat dengan sengaja untuk menipu ada memperdaya orang lain, sementara disinformasi mencakup berbagai jenis informasi yang salah atau menyesatkan yang dapat disebarkan baik disengaja maupun tidak disengaja.

Penanganan melalui literasi publik menunjukkan terdapat kebutuhan untuk memeriksa dan membantah hoaks karena informasi yang tidak benar dapat menyebar luas dan mempengaruhi publik, yang dapat mengganggu tatanan etika di masyarakat. Selain itu, hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan dapat memecah belah NKRI sehingga mengganggu proses pembangunan nasional (Amilin, 2019). Menurut Silverman (2015), jurnalis yang bekerja pada media memiliki peran sebagai salah satu otoritas informasi di masyarakat. Untuk itu, media memiliki peran krusial dalam membantah hoaks yang tersebar luas di berbagai platform media digital. Media dapat membantu mengurangi penyebaran hoaks yang memunculkan perbedaan persepsi, menyajikan informasi yang terintegrasi, dan melakukan pemeriksaan terhadap informasi yang tidak benar atau hoaks. Pemeriksaan hoaks merupakan langkah membantah informasi yang tidak benar, dengan tujuan memastikan bahwa diskusi politik didasarkan pada fakta yang akurat dan mendorong debat yang berlandaskan pengetahuan.

Pemeriksaan informasi yang tidak benar atau tidak objektif oleh media ini disebut juga sebagai debunking hoaks. Dalam *debunking hoaks*, media melakukan pemeriksaan informasi menggunakan sumber yang terpercaya, memastikan informasi diberikan secara objektif, transparan, akurat, dan bebas dari pengaruh politik. Selain itu, pemeriksaan dilakukan menggunakan kode etik jurnalistik. Dengan melakukan beberapa langkah ini, media dapat membantu debunking hoaks atau informasi tidak benar yang beredar di masyarakat (Adnan, 2024; Muzykant,

Muqsith, Pratomo, & Barabash, 2021; Rosemarwati & Lindawati, 2019).

Mudahnya berbagi informasi di era digital membuat penyebaran hoaks semakin marak. Dampak secara sederhana dapat diartikan sebagai pengaruh dan akibat. Dampak juga bisa terjadi melalui proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Hoaks dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik tentang kandidat, partai politik, atau isu-isu yang berkaitan dengan pemilu. Informasi palsu yang disebar dengan tujuan memengaruhi preferensi pemilih dapat merusak proses pemilihan yang adil dan demokratis. Dampak hoaks yang terjadi pada pemilu sangat berpengaruh kepada tiga kandidat pilpres, di dalam media berbagai macam hoaks yang di unggah untuk menjatuhkan reputasi capres dan cawapres hingga partai politik. Oleh karena itu, khalayak harus memeriksa berita dengan detail dan valid untuk mencegah persepsi buruk pada pemilu 2024.

Sejumlah media *online* turut melakukan proses debunking hoaks yang muncul selama periode kampanye Pemilu 2024. Debunking hoaks melibatkan analisis fakta, penggunaan data yang sah, dan komunikasi yang jelas untuk meredakan kepercayaan pada informasi palsu. Langkah-langkah ini membantu masyarakat untuk mengembangkan literasi informasi dan meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks. Debunking berperan penting dalam melawan disinformasi dan mempromosikan pemahaman yang lebih objektif dan benar di tengah arus informasi yang kompleks dan seringkali menyesatkan. Empat media *online* di Indonesia menerima sertifikasi International *Fact Checking Network* (IFCN) sejak 2018, yakni Kompas.com, Tempo.co, Liputan6.com, dan Tirto.id (Nurlatifah & Irwansyah, 2021). Kompas.com, Tempo.co, dan Liputan6.com menayangkan artikel pemeriksaan hoaks melalui kanal Cek Fakta, sedangkan Tirto.id tidak membuat kanal khusus tetapi memberikan subjudul periksa fakta pada setiap artikel pemeriksaan hoaks. Untuk itu, peneliti menghitung jumlah berita terkait pemeriksaan hoaks pada tiga media, yakni Kompas.com, Liputan6.com, dan Tempo.co, periode kampanye Pemilu 2024 yang berlangsung pada 28 November 2023-10 Februari 2024. Berdasarkan pengamatan pada tiga media itu, berita yang memuat hasil pemeriksaan hoaks menunjukkan media *online* memeriksa atau melakukan teknik debunking hoaks yang beredar di media sosial. Teknik debunking hoaks di antaranya penelusuran kata kunci di Google dan

wawancara dengan pihak terkait seperti pejabat pemerintah, ahli, atau orang yang disebutkan dalam konten hoaks (Kanozia, et al., 2021). Sementara itu, berita yang memuat hasil cek fakta menunjukkan media *online* memeriksa klaim atau pernyataan pejabat.

Tabel 1. 1 Jumlah Berita Debunk Hoaks pada Kanal Cek Fakta Periode 28 November 2023 – 10 Februari 2024

Media online	Kanal	Jumlah Cek Hoaks	Jumlah Cek Fakta	Total
Liputan6.com	https://www.liputan6.com/cek-fakta	42	42	84
Tempo.co	https://cekfakta.tempo.co	47	79	126
Kompas.com	https://www.kompas.com/cekfakta	67	86	153

Sumber: Olahan Penelitian, 2024.

Media Liputan6.com memiliki jumlah berita dari cek hoaks dan cek fakta sebanyak 84 berita. Tempo.co memiliki berita 126 berita dari cek hoaks dan cek fakta. Data ini memperlihatkan bahwa jumlah berita debunking hoaks tidak signifikan di Liputan6.com dan Tempo.co, sehingga kurang memadai untuk dijadikan fokus penelitian. Menilik data di atas, penelitian akan fokus pada Kanal Cek Fakta Kompas.com yang menyajikan berita terkait pemeriksaan hoaks dan fakta paling banyak dibandingkan dua media lainnya, yakni 153 berita. Pada media Liputan6.com memiliki jumlah berita dari cek hoaks dan cek fakta sebanyak 84 berita. Sedangkan, pada media Tempo.co memiliki berita 126 berita dari cek hoaks dan cek fakta. Kompas.com merupakan salah satu pionir media *online* di Indonesia yang sudah berdiri sejak 14 September 1995 (Prajarto, 2021). Pada Maret 2024, similarweb.com, situs yang mengukur peringkat media *online*, mencatat Kompas.com sebagai situs berita paling populer setelah mencatat 187,4 juta pengunjung pada Februari 2024, yang merupakan bulan pencoblosan pemilihan umum. Dengan ini, Kompas.com berhasil mempertahankan posisinya pada peringkat pertama situs berita di Indonesia setelah mencatat hasil serupa pada Januari 2024. Sebelumnya, pada Desember 2023, Kompas.com berada di posisi kedua Tribunnews (Similarweb, 2024). Hal tersebut menunjukkan bahwa kompas.com mampu bersaing dengan media *online* lainnya dalam hal penyajian informasi. Keunggulan utama dari Kompas.com, yaitu kecepatan dan aktualitas berpotensi dapat menggantikan koran, majalah, bahkan televisi (Prajarto, 2021).

Selain itu, selama Pemilu 2024, Tim Cek Fakta Kompas.com memiliki

Cek Fakta Pemilu, yakni pemeriksaan terhadap sejumlah hoaks dan disinformasi beredar menjelang dan selama tahun pemilu. Kompas.com sudah melakukan kerja cek fakta sejak 2016 dan membentuk tim khusus pada 2018. Tim terdiri atas 9 reporter dan 4 editor. Para pemeriksa fakta (debunker) di Kompas.com juga dibekali dengan kemampuan melakukan penelusuran terkait kerja-kerja cek fakta. Kompas.com menggunakan tools seperti Crowdtangle untuk melakukan pemantauan informasi yang beredar di media sosial. Kompas.com juga menetapkan batasan tentang informasi yang diverifikasi, yakni viral (dengan parameter tertentu), pesan berantai, mempertimbangkan isu dan dampaknya. Selanjutnya, Kompas.com melakukan upaya verifikasi melalui sejumlah cara di antaranya melakukan penelusuran digital, dan wawancara pihak berwenang untuk mengonfirmasi informasi tersebut (Kompas.com, n.d.).

Dalam cek fakta dan cek hoaks memiliki perbedaan masing-masing, yaitu cek fakta merupakan proses memeriksa kebenaran informasi yang disajikan dalam sebuah teks, berita, atau pernyataan dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Sedangkan, cek hoaks merupakan proses memeriksa informasi kebenaran yang diduga telah dikonfirmasi sebagai hoaks, atau informasi palsu yang disebarkan secara sengaja. Penelitian ini akan memfokuskan pada cek hoaks agar lebih sesuai dalam konteks menghadapi dampak negatif dari penyebaran informasi palsu.

Pemeriksaan hoaks merupakan bentuk tanggung jawab Kompas.com sebagai media untuk menyajikan informasi yang akurat dan berimbang selama proses pemilihan umum. Sebagai media yang beroperasi di Indonesia, Kompas.com juga bertanggung jawab media massa dalam mengeluarkan informasi yang benar, relevan, dan bertanggung jawab. Selain itu, Kompas.com wajib mengikuti kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia, serta mematuhi peraturan-peraturan undang-undang yang berhubungan dengan kebebasan media (Fadli, 2018). Kanal Cek Fakta Kompas.com tidak langsung muncul pada halaman (home) Kompas.com. Namun, kanal ini dapat ditemukan melalui alat Kanal ini dibuka dengan sebuah hoaks bertuliskan "HOAKS ATAU FAKTA". Hoaks ini juga memuat nama-nama wartawan yang menjadi pemeriksa fakta (debunker), metodologi verifikasi yang digunakan, dan pendanaan. Hoaks juga memuat fitur

laporkan hoaks, yakni sistem pelaporan kerja sama dengan TurnBackHoax Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Kompas.com menyajikan berita pada kanal ini dengan tiga label, yakni hoaks, klarifikasi, dan cek fakta. Berita adalah bagian dari komunikasi massa yang memberikan informasi kepada kita mengenai peristiwa, isu dan sesuatu yang unik (khas) di dunia (Harahap, 2014). Berita mengandung kebenaran, yakni fakta di lapangan atas peristiwa yang terjadi (Lubis & Koto, 2020).

Pada berita dengan label “hoaks”, Kompas.com menyajikan hasil pemeriksaan konten yang beredar di media sosial yang terbukti hoaks atau false information. Misalnya, pada berita berjudul “[HOAKS] Gaji Guru di Medan Ditahan, Dipaksa Pilih Paslon 02”, Kompas.com menguraikan konten yang beredar, yaitu klaim bahwa para guru di Medan ditahan gajinya dan dipaksa memilih paslon nomor urut 2 dalam Pilpres 2024. Mereka kemudian memberikan hasil penelusuran dari Tim Cek Fakta Kompas.com yang menyimpulkan bahwa klaim tersebut adalah hoaks.

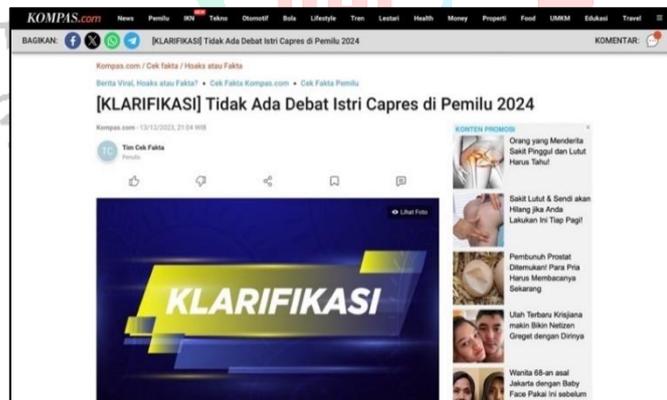
Pada berita dengan label klarifikasi, Kompas.com menerapkan hal serupa pada berita dengan label “hoaks”, yakni menyajikan hasil pemeriksaan konten yang beredar di media sosial. Perbedaannya adalah jika label hoaks merujuk pada informasi yang sepenuhnya palsu (*false information*), sedangkan label ‘klarifikasi’ merujuk pada disinformasi. Disinformasi adalah konten informasi yang tidak akurat atau dimanipulasi yang diproduksi dan disebar dengan sengaja (Azwar, Soetarto, Lubis, 2022). Misalnya, pada berita berjudul “[KLARIFIKASI] Video Pawai Busana Rimpu di Bima, Bukan Kampanye Pendukung Anies”, Kompas.com menyajikan berita dengan menjelaskan konten yang beredar, yaitu video pawai pendukung calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), serta klaim yang menyertainya. Mereka kemudian memberikan hasil penelusuran dari Tim Cek Fakta Kompas.com yang menegaskan bahwa klaim tersebut keliru dan salah konteks.



Gambar 1.1 Contoh Berita dengan Label Cek Fakta



Gambar 1.2 Contoh Berita dengan Label Hoaks



Gambar 1.3 Contoh Berita dengan Label

Berdasarkan penjelasan di atas, label [CEK FAKTA] menunjukkan cek fakta atau hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Kompas.com terhadap pernyataan narasumber. Sementara itu, label “[HOAKS]” dan [KLARIFIKASI] menunjukkan cek hoaks atau hasil pemeriksaan Tim Cek Fakta Kompas.com terhadap konten yang beredar di media sosial. Perbedaan kedua label, yakni label “[HOAKS]” merupakan pemeriksaan terhadap konten hoaks di media sosial dan label [KLARIFIKASI] merupakan pemeriksaan terhadap konten yang memuat klaim

terhadap sesuai di media sosial. Dengan demikian, cek fakta merupakan proses memeriksa kebenaran informasi yang disajikan dalam suatu teks, berita, atau pernyataan dengan tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Sedangkan, cek hoaks merupakan proses memeriksa informasi kebenaran yang diduga sebagai hoaks, atau informasi palsu yang disebarkan secara sengaja.

Pada berita dengan label Cek Fakta, Kompas.com menyajikan hasil pemeriksaan terhadap klaim dari pejabat atau elite politik. Misalnya, pada berjudul “CEK FAKTA: Anies Sebut Guru dan Dosen di Jakarta Dibebaskan dari PBB”, Kompas.com menguraikan klaim yang disampaikan oleh Anies Baswedan dalam debat Pilpres 2024, yaitu bahwa Pemprov DKI Jakarta membebaskan tenaga pengajar dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Setelah itu, Kompas.com memberikan informasi faktual yang mengkonfirmasi bahwa klaim tersebut sesuai dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya.

Penelitian ini hendak menganalisis berita yang memuat hasil pemeriksaan konten yang beredar di media sosial baik dengan label ‘hoaks’ maupun ‘klarifikasi’ karena berita tersebut menunjukkan upaya debunking hoaks. Peneliti akan menganalisis berita terkait konten yang beredar di media sosial melalui sejumlah konsep, yakni media distribusi hoaks untuk mengetahui asal konten yang diperiksa, penyajian hoaks untuk mengetahui bentuk konten media sosial yang diperiksa, teknik debunk, serta jenis hoaks (Kanozia, et al., 2021).

Media distribusi hoaks mengacu pada platform atau saluran tempat konten hoaks pertama kali muncul atau menyebar. Dalam konteks ini, media sosial menjadi perhatian utama. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan WhatsApp yang sering menjadi tempat penyebaran hoaks. Pada penelitian ini, peneliti akan mengidentifikasi media sosial yang paling sering menjadi tempat Kanal Cek Fakta menemukan hoaks. Penyajian atau format hoaks merujuk pada bentuk penyampaian konten hoaks di media sosial seperti video, gambar, teks, dan audio. Penelitian ini akan mengidentifikasi format konten yang memuat informasi palsu atau hoaks. Teknik merupakan adalah strategi atau metode yang digunakan untuk membantah klaim hoaks dan menyajikan fakta sebagai koreksi. Sementara itu, jenis hoaks terkait kategori atau tipe informasi palsu yang beredar di media sosial.

Adapun, bentuk tinjauan literatur yang digunakan dan dijadikan bentuk referensi dalam penelitian ini. Penelitian yang pertama yang berjudul “Multi Kasus Perkembangan Organisasi Pengecekan Fakta di Indonesia” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ditta Hermawan, Rudi Hartanto dan Irma Garnesia pada tahun 2022 dapat dijadikan panduan untuk membuat penelitian ini. Dari penelitian ini, penulis dapat mengetahui bagaimana proses pengembangan pengecekan fakta di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini cocok untuk dijadikan pedoman sebagai gambaran bagaimana cara pengembangan dalam pengecekan fakta pada portal berita Kompas.com. Dimana hasil dari penelitian ini, menunjukkan bahwa berbagai inisiatif cek fakta di Indonesia masih memiliki tantangan dalam konteks standarisasi metodologi cek fakta, evaluasi pengukuran “dampak” dari aktivitas cek fakta, serta terkait pengelolaan sumber daya pemeriksa fakta dalam masing-masing organisasi. Studi ini mencoba memberikan gambaran tentang organisasi pemeriksa fakta di Indonesia. Perbedaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu pertama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini adalah penelitian ini akan berfokus pada menganalisis cara penyajian berita oleh kanal Cek Fakta Kompas.com dalam mengatasi hoaks pemilihan umum 2024.

Penelitian terdahulu kedua berjudul “Peningkatan Literasi Informasi Anti Berita Hoaks Jelang Pemilu 2024 Pada Warga Paguyuban At- Taufiq, Kec. Babelan, Kab. Bekasi” yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dede Suprayitno pada tahun 2022 dijadikan pedoman untuk membuat penelitian selanjutnya. Penelitian ini membahas mengenai hoaks pemilu 2024. Hal ini dapat dijadikan acuan perbandingan pada penelitian ini adalah pentingnya membaca informasi untuk menghindari berita hoaks. Perbedaan dengan penelitian ini dengan perbedaan selanjutnya dengan berfokus pada upaya peningkatan literasi informasi dan pengetahuan serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hoaks di paguyuban At-Taufiq, Bekasi menjelang pemilu 2024. Sedangkan penelitian selanjutnya yaitu lebih berfokus pada analisis isi kualitatif tentang cara penyajian berita di kanal Cek Fakta Kompas.com, terutama terkait dengan hoaks dalam pemilihan umum 2024 dan dampaknya terhadap persepsi.

Pada penelitian terdahulu ketiga berjudul “Tingkat Kepuasan Pembaca Terhadap Kualitas Pemberitaan Kanal Cek Fakta Pada Portal *Online* Kompas.Com

Diajukan” yang dilakukan oleh Rafi Fadillah Achmat pada tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai acuan karena membahas pemberitaan kanal cek fakat pada Kompas.com dalam menyajikan suatu berita yang terbilang hoaks. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian selanjutnya adalah Penelitian ini fokus pada tingkat kepuasan pembaca terhadap kualitas pemberitaan yang disajikan di kanal Cek Fakta Kompas.com dan lebih mempertimbangkan perspektif pembaca terhadap pemberitaan tersebut. Sementara penelitian selanjutnya, lebih fokus pada analisis isi kualitatif tentang cara penyajian berita di kanal Cek Fakta Kompas.com, khususnya terkait hoaks pada pemilihan umum 2024.

Dari ketiga penelitian terdahulu di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat jenis-jenis penyajian hoaks sudah sangat luas. Oleh karena itu, peneliti diharapkan membuat penelitian berupa pengecekan fakta guna untuk mengetahui data akurat dan menghindari berita hoaks pada portal media *online*.

Berdasarkan pada fenomena tersebut peneliti berfokus untuk menganalisis isi berita debunk hoaks pada kanal cek fakta di media Kompas.com pada periode 28 November 2023–10 Februari 2024. Peneliti menggunakan judul “PENYAJIAN BERITA DEBUNK HOAKS PEMILU 2024 PADA KANAL CEK FAKTA DI KOMPAS.COM (ANALISIS ISI KUANTITATIF BERITA DEBUNK HOAKS PEMILU 2024)”. Peneliti menggunakan periode tersebut karena masa kampanye pemilu 2024 dimulai dari bulan November sampai Februari dengan maraknya berita debunk hoaks di media terkait paslon 1,2 dan 3 hingga partai-partai yang ikut serta dalam mendukung pilihan masing-masing. melihat dari seberapa melonjak tinggi konten edukasi dibandingkan pada tahun sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penyajian berita terkait hasil pemeriksaan debunk hoaks pada Kanal Cek Fakta di Kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024?” dan diuraikan menjadi sejumlah pertanyaan lebih terperinci sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta

- media *online* kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024?
2. Bagaimana media distribusi dalam hoaks berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media *online* kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024?
 3. Bagaimana penyajian hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media *online* kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024?
 4. Bagaimana teknik debunk hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media *online* kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun maksud utama dari studi ini adalah untuk “menganalisis penyajian berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media *online* kompas.com periode 28 November 2023 – 10 Februari 2024.” Tujuan penelitian ini diuraikan lebih detail sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan jenis hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media online kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024.
2. Mendeskripsikan media distribusi dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media online kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024.
3. Mendeskripsikan penyajian hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media online kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024.
4. Mendeskripsikan teknik debunk hoaks dalam berita debunk hoaks pada kanal cek fakta media online kompas.com periode 28 November 2023–10 Februari 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini diselesaikan, harapannya adalah bahwa hasil yang diperoleh akan memberikan manfaat. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua bagian:

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini akan mampu memperkaya penelitian dengan bidang jurnalistik pada penyajian berita terkait hoaks pemilu 2024.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Secara spesifik, harapannya adalah bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada pengelola berita atau jurnalistik media Kompas.com terkait penyajian berita debunk hoaks pada pemilu 2024 agar dapat diaplikasikan dalam portal media.
2. Secara keseluruhan, harapannya adalah bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi atau masukan kepada para jurnalistik agar fokus pada penyajian berita debunk hoaks yang lebih terperinci.